TESIS

PENUTUPAN GEREJA METHODIST INDONESIA KANAAN JAMBI OLEH PEMERINTAH KOTA JAMBI DITINJAU DARI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 BERDASARKAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

FREENDY CLINTON

225214738

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama	:	Freendy Clinton
Nomor Mahasiswa	:	225214738
Konsentrasi	:	Hukum Litigasi
Judul Tesis	:	PENUTUPAN GEREJA METHODIST INDONESIA KANAAN JAMBI OLEH PEMERINTAH KOTA JAMBI DITINJAU DARI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 BERDASARKAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM.	17/7-2026	
2. Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.	16/7-2026	

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama	:	Freendy Clinton
Nomor Mahasiswa	:	225214738
Konsentrasi	:	Hukum Litigasi
Judul Tesis	:	PENUTUPAN GEREJA METHODIST INDONESIA KANAAN JAMBI OLEH PEMERINTAH KOTA JAMBI DITINJAU DARI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 BERDASARKAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada tanggal 24 Juli 2026

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**	
2. Anggota	**Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.**	
3. Anggota	**Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.**	

Ketua Program Studi

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Freendy Clinton

Nomor Mahasiswa : 225214738

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

"PENUTUPAN GEREJA METHODIST INDONESIA KANAAN JAMBI OLEH PEMERINTAH KOTA JAMBI DITINJAU DARI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 BERDASARKAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS"

Adalah hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Yang menyatakan:



Freendy Clinton
No. Mahasiswa. 225214738

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas segala berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "PENUTUPAN GEREJA METHODIST INDONESIA KANAAN JAMBI OLEH PEMERINTAH KOTA JAMBI DITINJAU DARI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 BERDASARKAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS". Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Fakultas Magister di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LLM. yang menjabat sebagai Rektor UAJY serta sebagai Pembimbing Tesis Pertama. Didalam jadwalnya yang padat untuk memimipin Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terus meluangkan waktu demi membimbing penyelesaian Tesis ini.
2. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing Tesis kedua yang dengan sabar menghadapi penulis dan menuntun penyelesaian Tesis ini dengan memberikan koreksi atas kesalahan-kesalahan, dan banyak masukan untuk menyempurnakan penulisannya. Selain membimbing, juga memberikan dorongan untuk selalu semangat menghadapi waktu yang sangat terbatas.
3. Kepada Dekan & Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum., & Bapak Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum.

4. Ketua Program Studi Hukum S2 Bapak Dr. Hyronimus Rhiti , SH.,LLM. serta seluruh jajaran Dosen yang mendidik kami di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Narasumber Jeremia Saragih, Pengurus Rumah Ibadah Gereja Methodist Indonesia (GMI) Kanaan Jambi & Liphan Pasaribu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Jambi.
6. Untuk Keluargaku, ayahku Victor H. Jailim Sinaga dan ibuku Roselin Pakpahan, adikku Christin Eunike Debora Sinaga, yang berada jauh di Jambi selama penulisan ini, tetapi selalu menemaniku dan memperhatikan lewat Doa, dukungan, dorongan, bantuan keuangan, dan banyak lagi.
7. Untuk teman-temanku yang kutemui di Fakultas Hukum Magister Hukum, terutama Nirmala Sari Dwi Sukma Puteri, Felicia, Angela Wynne Tammy, temanku dari Republic of The Gambia, Jeremiah Ousu Mendy, dan sahabatku dari Universitas Jambi yang selalu setia menemani, Sondang Panjaitan.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik dan saran diharapkan demi untuk memperdalam dan kesempurnaan dalam topik ini. Di akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Yogyakarta, 17 Juli 2026

Penulis



Freendy Clinton
No. Mahasiswa. 225214738

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 18
C. Tujuan Penelitian 18
D. Manfaat Penelitian 19
E. Keaslian Penelitian 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 25
1. Tinjauan tentang Teori Keadilan John Rawls 25
2. Subjek Keadilan 29
3. Hakikat Keadilan 31
4. Prinsip-Prinsip Keadilan 35
5. Cara Pandang Keadilan Sebagai *Fairness* 39
6. Institusi Sebagai Subjek Keadilan dan Keadilan Formal 42
7. Kesetaraan yang Fair atas Kesempatan dan Keadilan Prosedural Murni 45
8. Tinjauan tentang Keberadaan Hukum dalam Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia (HAM) 47
9. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Dasar Manusia ... 49

10. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia tentang Persamaan Hak Kebebasan Beragama 54
B. Batasan Konsep 66

BAB III CARA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 70
B. Pendekatan Penelitian 71
C. Data Penelitian 71
1. Jenis Data 71
2. Bahan Hukum 72
D. Lokasi, Populasi dan Sampel 73
E. Alat dan Cara Pengumpulan Data Penelitian 74
F. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan 74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pemerintah Kota Jambi Tidak Mau Menerbitkan Izin Mendirikan Rumah Ibadat Bagi Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi 75
B. Tindakan Pemerintah Kota Jambi Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 98
B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 101

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "PENUTUPAN GEREJA METHODIST INDONESIA KANAAN JAMBI OLEH PEMERINTAH KOTA JAMBI DITINJAU DARI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 BERDASARKAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS". Tesis ini bertujuan: 1) Mengetahui alasan Pemerintah Kota Jambi tidak mau menerbitkan izin mendirikan rumah ibadat bagi Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi, dilihat secara normatif. 2) Mengetahui dengan merujuk Teori Keadilan John Rawls, apakah tindakan Pemerintah Kota Jambi bertentangan dengan konsep keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikonsepkan sebagai apa yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia. Sumber datanya adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan wawancara langsung di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Jambi. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Alasan Pemerintah Kota Jambi tidak mau menerbitkan izin mendirikan rumah ibadat bagi Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi yaitu Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi tidak memiliki izin pendirian tempat ibadat karena dianggap menganggu ketertiban umum. 2) Dengan merujuk Teori Keadilan John Rawls, apakah tindakan Pemerintah Kota Jambi bertentangan dengan konsep keadilan adalah dalam menetapkan peraturan didasarkan atas kesetaraan dengan tujuan dari syarat-syarat untuk mempresentasikan kesetaraan antara manusia sebagai makhluk moral dan sebagai makhluk yang memiliki konsepsi mengenai kebajikan dan memiliki rasa keadilan.

Kata Kunci : Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, Teori Keadilan John Rawls

ABSTRACT

This thesis is entitled "CLOSURE OF INDONESIAN METHODIST CHURCH KANAAN JAMBI BY JAMBI CITY GOVERNMENT REVIEWED FROM JOINT REGULATION OF MINISTER OF RELIGION AND MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 9 AND NUMBER 8 OF 2006 BASED ON JOHN RAWLS THEORY OF JUSTICE". This thesis aims to: 1) Find out the reasons why Jambi City Government does not want to issue a permit to build a house of worship for the Indonesian Methodist Church Kanaan Jambi, viewed normatively. 2) Find out by referring to John Rawls Theory of Justice, whether the actions of Jambi City Government are contrary to to the concept of Justice.. This research is a normative legal research which is conceptualized as what is stated in the legislation or law which is conceptualized as rules or norms which are the benchmarks for human behavior. The data source is primary data, namely data obtained directly from respondents through direct interviews at the National Unity and Politics Agency (KESBANGPOL) of Jambi City. Secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials, analyzed using legal analysis methods. The results of the study indicate that: 1) The reason the Jambi City Government does not want to issue a permit to build a house of worship for the Indonesian Methodist Church Kanaan Jambi, namely the Indonesian Methodist Church Kanaan Jambi does not have a permit to build a place of worship because it is considered to disturb public order. 2) By referring to John Rawls' Theory of Justice, whether the actions of the Jambi City government are contrary to the concept of justice, namely in establishing regulations based on equality with the aim from the requirements for representing equality between humans as moral beings and as beings with a conception of virtue and a sense of justice.

Keywords : *The Indonesian Methodist Church Kanaan Jambi, Joint Regulation of Minister of Religion and Minister of Home Affairs Number 9 and Number 8 of 2006, John Rawls Theory of Justice*